
**Prediksi Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Terhadap
Financial Distress Dimoderasi *Capital Intensity* pada
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera**



Sunardi¹, Ety Murwaningsari²

¹Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

²Akuntansi, Universitas Trisakti Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia

sunardifeb@mail.com, ettynasser@yahoo.com.

INFO ARTIKEL

Tanggal revisi:
30 Juli 2021

Tanggal diterima:
13 September 2021

Tanggal diterbitkan online:
15 September 2021

Kata Kunci:

Value Relevance of Accounting Information, Financial Distress and Capital Intensity

ABSTRAK

This study aims to predict the value relevance of accounting information to financial distress and the role of capital intensity in moderating the relationship between these variables. The research population of 32 district and city governments in South Sumatra and Lampung Provinces. The data analysis method used logistic regression, the research findings show that financial independence ratios, long-term solvency ratios and short term solvency ratios can negative predict financial distress, while financial flexibility ratios, operating solvency ratios and services solvency ratios can positive predict financial distress, then Intensity capital can moderate (weaken) financial distress for all independent variables. So the local government financial reports have a high relevance value for decision making for the users so that they can detect financial distress. The implications for local governments can be used as an instrument in anticipating the possibility of financial difficulties or as an early.

1. PENDAHULUAN

Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010). Melalui laporan keuangan dapat dilihat kondisi keuangan pemerintah daerah, kondisi keuangan yang tidak baik akan berdampak pada pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) dan

pemenuhan program dan kegiatan. *Financial distress* dalam pemerintah daerah diartikan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan standar pelayanan minimal yang ditetapkan (Yanti, 2018), sebaliknya pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang baik, jika mampu membayar kewajiban keuangan dan kewajiban pelayanan kepada masyarakatnya saat ini dan masa mendatang (Cohen & Zopounidis, 2011).

Pada pemerintah daerah *financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran untuk belanja operasional (rutin), sehingga pemerintahan daerah menekan pengeluaran belanja modal atau investasi (Dunan & Efriyanti, 2017). Kesulitan keuangan dapat secara bergantian dinyatakan sebagai kesulitan ekonomi, tekanan ekonomi, tekanan keuangan (Assari, 2019), (Chamboko et al., 2017). Meningkatnya ketidakpastian dan kompleksitas dapat memacu terjadinya tekanan keuangan (Steccolini et al., 2018), ketidakstabilan ekonomi dan sosial serta efektivitas anggaran pendapatan dapat menyebabkan terjadinya tekanan keuangan (Gregori & Marattin, 2019).

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan, serta posisi aset dan kewajiban, sehingga laporan keuangan harus disusun sesuai karakteristik kualitatif sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah: a) relevan, b) andal, c) dapat diperbandingkan dan d) dapat dipahami. Laporan keuangan dianggap relevan apabila dapat menyajikan informasi yang memiliki manfaat umpan balik (*feed back value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*time lines*) dan lengkap (*completeness*). Memiliki manfaat prediktif dimaksudkan informasi akuntansi dapat membantu pemakai untuk memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Salah satu instrumen untuk apakah laporan keuangan dapat memprediksi masa depan adalah rasio keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Prawira & Krismayanti, 2019), termasuk didalamnya adalah memprediksi potensi kebangkrutan, oleh pemerintah daerah dipergunakan sebagai evaluasi kinerja pemerintah daerah, sehingga tindakan untuk memperbaiki kondisi keuangan sangat diperlukan. Penilaian yang komprehensif memiliki kemampuan memprediksi terhadap manipulasi (Irwan Taufiq Ritonga, 2014), rasio keuangan pemerintah daerah dapat dipergunakan untuk mengklasifikasikan pemerintah daerah yang mengalami tekanan keuangan (Cohen & Zopounidis, 2011).

Capital intensity ratio adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap dibagi dengan penjualan (DeFond dan Hung, 2001). Commanor dan Wilson (1967) *capital intensity ratio* merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan. *Capital Intensity Ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal).

Penelitian yang terkait *financial distress*, rasio keuangan pemerintah daerah memiliki kemampuan memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah (Sutaryo, 2018), variabel yang mampu memprediksi *financial distress* adalah *short term liabilities/revenue*, *profit margin* dan opini audit (Indriaty et al., 2019); kondisi keuangan pemerintah daerah yang kurang sehat cenderung menuju kebangkrutan daerah (Ricci & Civitillo, 2015); pemerintah daerah yang tidak mengalami kesulitan atau tekanan keuangan dapat dilihat dari rasio perputaran kewajiban jangka pendek atas pendapatan saat ini dan ketergantungan pada subsidi (Manes-Rossi et al., 2020); faktor yang mempengaruhi *financial distress* adalah *return on asset* (ROA), *fixed cost to operating revenue* (FETOR) dan *debt to revenue* (DTR) (Wulandari et al., 2018), semua pemerintah daerah 99 persen berisiko atau tidak berisiko *financial distress* (Trussel & Patrick, 2018). Ketergantungan pada subsidi pada pemerintah yang lebih tinggi, salah satu indikasi tekanan keuangan (Cohen et al., 2017), pengeluaran yang berlebihan berarti kurangnya pemahaman administrasi publik, akan berdampak pada krisis keuangan. (Ricci & Civitillo, 2015). Disisi lain penurunan pendapatan menyebabkan kesulitan keuangan (Watson et al., 2005), semakin besar jumlah penduduk maka tidak akan mengalami tekanan keuangan, karena penduduk merupakan sumber daya yang strategis (Wulandari et al., 2018), pemerintah daerah yang memiliki perbandingan nilai realisasi belanja administratif dengan total belanja lebih dari 60,75%, maka tidak akan mengalami tekanan keuangan (Hermawan & Herusantoso, 2015).

Kondisi keuangan pemerintah daerah khususnya pendapatan daerah secara nasional menurun 17% dan khususnya pendapatan asli daerah menurun 25 s.d 28%, sehingga mengganggu belanja daerah, solusi pemerintah daerah yaitu melakukan usulan pinjaman untuk pemulihan ekonomi kepada pemerintah pusat. Nilai APBN besarnya anggaran pinjaman daerah sebesar 10 triliun, namun sampai bulan November 2020, pengajuan sudah

mencapai 52, 66 triliun (Menteri Keuangan RI, 2020), pinjaman daerah bila tidak dikelola secara baik, akan berdampak pada APBN dan APBD tahun berikutnya dan berimbas pada *financial distress* pemerintah daerah.

Kesulitan keuangan merupakan situasi pemerintah tidak lagi mampu membayar kewajiban jangka pendek dan panjang serta solvabilitas anggaran (Maher et al., 2020), pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan berfokus pada belanja pegawai dan operasional tetapi minim terhadap infrastruktur dan belanja modal (Rusdi & Fuad, 2018). Dampak krisis keuangan adalah penurunan surplus anggaran, sedangkan total pendapatan dan asset terus bertambah (Lai et al., 2014), durasi kesulitan keuangan dipertimbangkan dalam memilih opsi untuk menerapkan opsi (Avellaneda & Gomes, 2017). Risiko keuangan secara positif berhubungan dengan kewajiban, jumlah penduduk, pajak dan layanan publik, sementara risiko keuangan berhubungan negatif dengan pendapatan, belanja modal dan saldo dana (Trussel & Patrick, 2018).

Capital intensity ratio menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dari pemanfaatan asset tetap, apabila pemerintah daerah dalam memanfaatkan asset tetap yang dimiliki dapat dilakukan dengan efektif, maka akan mengurangi tekanan keuangan, sebaliknya pemerintah daerah yang tidak dapat memanfaatkan asset tetap, maka justru akan menimbulkan tekanan keuangan (asset tetap memerlukan beban pemeliharaan), Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivityanya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan, (Hanum, 2013), alasan inilah diharapkan *capital intensity ratio* dapat memoderasi *financial distress*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah penambahan indikator dengan mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2020 yaitu solvabilitas layanan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

Pengelolaan keuangan daerah kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan (Permendagri No. 19 Tahun 2020.) PKD dilakukan dengan cara pemerintah daerah

Prediksi Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Terhadap *Financial Distres* Dimoderasi
Capital Intensity

menyusun laporan keuangan yang didasarkan standar akuntansi pemerintahan (Permendagri No. 71 tahun 2010). Dalam rangka untuk mengetahui kondisi keuangan daerah diperlukan laporan keuangan daerah, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah bermanfaat bagi pemakai dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

Kondisi keuangan daerah

Salah satu yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajibannya dan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dan mengesekusi hak keuangan secara efektif dan efisien dinamakan kondisi keuangan daerah. Untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara menghitung indeks kondisi keuangan pemerintah daerah (IKKPD), ada 6 indikator untuk mengukur IKKPD, yaitu : a) rasio kemandirian keuangan, suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau pengaruhnya baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, b) rasio fleksibilitas keuangan, suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*), c) rasio solvabilitas operasi, kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional dalam periode anggaran, d) rasio solvabilitas jangka pendek, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang, e) rasio solvabilitas jangka panjang, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, f) rasio solvabilitas layanan, kemampuan untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas layanan publik yang

dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Permendagri No. 19 Tahun 2020), (Irwan Taufiq Ritonga, 2014).

Financial distress

Financial distress merupakan kegagalan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan bidang operasi, kewajiban dan kebutuhan sumber daya masyarakat selama beberapa tahun berturut turut (Maher et al., 2020), suatu kondisi di mana pemerintah daerah mengalami defisit operasi yang persisten selama tiga tahun berturut-turut (Trussel & Patrick, 2018). *Financial distress* pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan belanja modal sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, bahwa porsi belanja modal ditetapkan sebesar 30%.

Pengukuran masing-masing variabel dilakukan dengan cara: a) untuk mendeteksi apakah pemerintah daerah dalam status *non financial distress* atau pemerintah daerah berstatus *financial distress*, maka dapat dilihat dari hasil perhitungan (proksi) perbandingan belanja modal dengan total belanja daerah, maka dinyatakan *financial distress* dan dilambangkan angka 0 bila perbandingan belanja modal dengan total belanja daerah < 30 %, selanjutnya jika perbandingan menghasilkan ≥ 30 % maka dinyatakan *nonfinancial distress* dan dilambangkan angka 1.

Pegembangan hipotesis

Pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian yang tinggi cenderung memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi, semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa daerah semakin mandiri dan tidak ketergantungan pada pemerintah pusat atau pinjaman, dan akan terhindar *financial distress*, (Sutaryo, 2018); (Lai et al., 2014), hipotesis yang akan diuji adalah:

H₁ : Rasio kemandirian keuangan dapat memprediksi terhadap *financial distress*

Semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang dan belanja pegawai, maka semakin baik kondisi keuangan pemerintah maka akan terhindar *financial distress*, (Wulandari et al., 2018); (Indriaty et al., 2019), sehingga hipotesis yang akan diuji adalah:

H₂ : Rasio fleksibilitas keuangan dapat memprediksi terhadap *financial distress*.

Semakin besar pendapatan pada laporan operasional maka semakin kuat dalam membayar belanja dalam laporan operasional, sehingga semakin tinggi kemampuan penda untuk melakukan pembayaran belanja dan terhindar dari *financial distress*, (Lai et al., 2014); (Ricci & Civitillo, 2015); (Assari, 2019), selanjutnya hipotesis yang akan diuji adalah:

H₃ : Rasio solvabilitas operasi dapat memprediksi terhadap *financial distress*.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban jangka pendek dapat ditutupi dengan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek, sehingga semakin tinggi maka akan semakin terhindar *financial distress*, (Trussel & Patrick, 2018); (Maher et al., 2020), sehingga hipotesis yang akan diuji adalah:

H₄ : Rasio solvabilitas jangka pendek dapat memprediksi terhadap *financial distress*.

Pemerintah daerah yang memiliki aset tetap akan dipergunakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan akhirnya akan menghasilkan pendapatan daerah, semakin besar aset tetap, pemerintah daerah yang memiliki aset tetap yang besar juga dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk kewajiban jangka panjang, sehingga semakin kecil rasio ini maka akan terhindar dari *financial distress*, (Trussel & Patrick, 2018); (Rusdi & Fuad, 2018); (Sutaryo, 2018), sehingga hipotesis yang akan diuji adalah:

H₅ : Rasio solvabilitas jangka panjang dapat memprediksi terhadap *financial distress*.

Jumlah penduduk yang besar dapat dipergunakan aset, disisi lain aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah bila dialokasikan secara efektif dan efisien akan menghasilkan pendapatan, maka semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar layanan, sehingga akan terhindar dari *financial distress* (Trussel & Patrick, 2018); (Wulandari et al., 2018), hipotesis yang akan diuji adalah:

H₆ : Rasio solvabilitas layanan dapat memprediksi terhadap *financial distress*.

Capital intensity ratio merupakan perbandingan total aset tetap dengan total pendapatan, aset tetap yang besar akan menghasilkan pendapatan sehingga kemandirian

keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasi, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan akan lebih baik sehingga terhindar dari tekanan keuangan, (Wulandari et al., 2018); (Trussel & Patrick, 2018);(Maher et al., 2020),sehingga hipotesis yang akan diuji adalah:

H_{7,8,9,10,11,12.} : *Capital intensity ratio* dapat memoderasi (memperlemah) prediksi nilai relevansi informasi akuntansi terhadap terhadap *financial distress*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji apakah nilai relevansi informasi akuntansi melalui rasio keuangan dapat memprediksi terjadinya satus *financial distress* pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung sebanyak 32 kabupaten dan kota dengan data yang diteliti tahun 2016 s.d 201, sehingga total data 96 amatan. Data bersumber dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan jumlah penduduk tahun 2016 s.d. 2018. Pengumpulan data menggunakan *website bpk.ri.go.id* dan website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.2019. sampel yang dipergunakan adalah sampel jenuh yaitu semua kabupaten dan kota yang termasuk dalam provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Variabel dependen.

Financial Distress (Y), yaitu suatu kondisi pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan, sehingga pelayanan publik terganggu, diukur dengan membandingkan total belanja modal dengan total belanja daerah, (Sutaryo, 2018); (Hanum, 2013), kondisi dikelompokkan menjadi 2 yaitu dinotasikan angka 0 bila perbandingan belanja modal dengan total belanja daerah $< 30\%$, selanjutnya jika perbandingan menghasilkan $\geq 30\%$ maka dinyatakan *nonfinancial distress* dan dilambangkan angka 1.

Variabel independen

- a. Rasio kemandirian keuangan (X_1), adalah suatu rasio yang menggambarkan ketidaktergantungan dengan pihak luar dalam kondisi apapun, diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan (Permendagri No. 19 Tahun 2020, (Hastaningrum et al., 2015), (Riphat et al., 2016) (Rusdi & Fuad, 2018), (Dunan & Efriyanti, 2017).

- b. Rasio Fleksibilitas keuangan (X_2), adalah rasio yang menggambarkan kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan utang, diukur dengan membandingkan (total pendapatan dikurangi dana alokasi khusus) dengan (total kewajiban ditambah belanja pegawai) (Permendagri No. 19 Tahun 2020, (Hastaningrum et al., 2015), (Riphat et al., 2016) (Rusdi & Fuad, 2018), (Dunan & Efriyanti, 2017).
- c. Rasio Solvabilitas operasi (X_3), adalah rasio yang menggambarkan suatu daerah mendapatkan pendapatan untuk membiayai beban, diukur dengan membagi (total pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) dikurangi pendapatan dana alokasi khusus dalam LO) dengan total beban dalam LO (Riphat et al., 2016); (Dunan & Efriyanti, 2017).
- d. Rasio Solvabilitas jangka pendek (X_4), adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah membayar kewajiban jangka pendek, diukur dengan membagi (kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek) dengan total kewajiban lancar. (Hastaningrum et al., 2015); (Sutaryo, 2018).
- e. Rasio Solvabilitas jangka panjang (X_5), adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka panjang, diukur dengan membagi total aset tetap dengan total kewajiban jangka panjang (Sutaryo, 2018); (Hastaningrum et al., 2015)
- f. Rasio Solvabilitas Layanan (X_6), suatu rasio yang menggambarkan penyediaan layanan publik, diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan jumlah penduduk (Permendagri No. 19 Tahun 2020); (Irwan Taufiq Ritonga, 2014).

Variabel Moderasi (X_7)

Capital Intensity ratio adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan daerah, diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total Pendapatan Daerah (Hanum, 2013); (Sutaryo, 2018). Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner (*binary logistic regression*), dengan bantuan SPSS versi 23. Regresi logistik biner ini digunakan apabila variabel *independennya* variable dikotomi, dalam penelitian ini *financial distress*

merupakan variabel dikotomi yang memiliki dua tingkatan berbeda, yaitu kabupaten dan kota yang mengalami *financial distress* dan kabupaten dan kota yang tidak mengalami *financial distress*, selain itu untuk melihat pengaruh sejumlah variabel *independen* terhadap *dependen* (*financial distress*)

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Log} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$\text{Log} = \beta_0 + \beta_1 X_1 * X_7 + \beta_2 X_2 * X_7 + \beta_3 X_3 * X_7 + \beta_4 X_4 * X_7 + \beta_5 X_5 * X_7 + \beta_6 X_6 * X_7 + e.$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut ini gambaran tentang nilai minimum, nilai maksimum, *mean* dan standar deviasi dari data beberapa variabel yang dapat dipergunakan sebagai bahan analisis:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Error	Std. Deviation Statistic
X1	96	31,70	,24	31,94	7,7291	,59990	5,87782
X2	96	5,19	,80	5,99	2,0688	,07202	,70560
X3	96	2,13	,49	2,62	1,0364	,02457	,24073
X4	96	10,78	,02	10,80	1,7231	,21551	2,11155
X5	96	11,92	3,20	15,12	12,1074	,43403	4,25256
X6	96	1,01	8,16	9,17	8,7064	,02409	,23605
Y	96	1	0	1	,30	,047	,462
X7	96	294,21	83,35	377,56	173,8072	5,37442	52,65835
Valid N (listwise)	96						

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa *range* terbesar pada variabel rasio kemandirian keuangan, yaitu 31,70 ini berarti adanya perbedaan yang jauh kemandirian keuangan daerah yang satu dengan yang lain, kemudian juga *capital intensity ratio* memiliki *range* 294,21 ini berarti bahwa total aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah menghasilkan pendapatan daerah.

Case processing summary menunjukkan bahwa sampel sebanyak 96 sampel, pemberian kode pada variable dependen adalah *financial distress* diberi kode 0 dan *non financial distress* diberi kode 1. Pada saat pengolahan data block 0 atau saat variable independend tidak dimasukkan maka nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ (117,623) > X2 tabel

(118.752) sehingga H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel *independend* adalah tidak *fit* dengan data.

Pengujian Hipotesis

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebelum variabel *independen* dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model. Nilai Slope atau Koefisien Beta (B) dari Konstanta adalah sebesar -0,837 dengan *Odds Ratio* atau $\text{Exp}(B)$ sebesar 0,433. Nilai Signifikansi atau p value dari uji *Wald* sebesar 0,000.

Tabel 2. Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	-,837	,222	14,193	1	,000	,433

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS, 2020

Tabel *iteration history* menunjukkan bahwa saat variabel *independen* dimasukkan dalam model nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ (63,875) < χ^2 tabel (109.773) sehingga H_0 diterima, hal ini menunjukkan bahwa model setelah memasukkan variabel *independend* adalah *fit* dengan data. Berdasarkan perhitungan *Omnitest of models coefficients* menunjukkan bahwa nilai χ^2 sebesar 53,747 > χ^2 tabel pada DF 7 (jumlah variabel independen 7) yaitu 14.067 atau dengan signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) sehingga menolak H_0 , hal ini menunjukkan bahwa penambahan variabel *independen* dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau model dinyatakan *fit*.

Pengujian signifikansi secara simultan dilakukan dengan *Chi Square* dari selisih perhitungan antara $-2 \text{ log likelihood}$ sebelum variabel *independen* dimasukkan dalam model dengan $-2 \text{ log likelihood}$ setelah variabel *independen* dimasukkan model, sehingga menerima H_1 dan menolak H_0 , ini berarti ada pengaruh signifikan secara simultan kondisi keuangan terhadap *financial distress*, karena nilai p value *Chi Square* sebesar 0,000 < 0,05 atau *Chi Square* hitung sebesar 53,747 > *Chi Square* tabel sebesar 14,067. Untuk melihat kemampuan variabel *independen* dalam menjelaskan variabel *dependen*, digunakan nilai *Cox & Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square*. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan *Pseudo R-Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,391 dan *Cox & Snell R Square* 0,429, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,607 atau 60,7% dan terdapat $100\% - 60,7\% = 39,3\%$ faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen.

Tabel 3. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	63,875 ^a	,429	,607

Sumber : pengolahan data SPSS, 2020

Pengujian *Good of fit test (GoF)* untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow test*, dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nilai signifikansi sebesar 0,932 ($> 0,05$), sehingga menerima H_0 , berarti model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan.

Tabel 4. Classification Table^a

Observed		Predicted		
		FIN DIS 0	FIN DIS 1	Percentage Correct
Step 1	FIN DIS 0	63	4	94,0
	FIN DIS 1	9	20	69,0
Overall Percentage				86,5

Sumber : hasil pengolahan data SPSS, 2020

Berdasarkan perhitungan pada *classification table* di atas, jumlah sampel yang mengalami *Financial distress* adalah sebanyak 67 sampel, tetapi yang benar benar mengalami *financial distress* sebanyak 63, selanjutnya sampel yang tidak mengalami *financial distress* adalah 29 sampel, tetapi yang benar-benar tidak mengalami *financial distress* sebanyak 20, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *overall percentage* sebesar 86,5 persen, ini berarti ketepatan model penelitian sebesar 86,5 persen. Tabel berikut ini menunjukkan prediksi variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara parsial:

Tabel 5. Persamaan variabel sebelum moderasi

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	RKK	-,770	,211	13,302	1	,000	,463
	RFK	,062	,671	,009	1	,926	1,064
	SO	2,870	2,047	1,965	1	,161	17,641
	SJPD	-,166	,201	,682	1	,409	,847
	SJPD	-,216	,087	6,141	1	,013	,806
	SL	7,213	3,129	5,315	1	,021	1357,316
	Constant	-59,124	24,695	5,732	1	,017	,000

Sumber : hasil Pengolahan data, SPSS, 2020

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel rasio fleksibilitas keuangan, rasio solvabilitas operasi dan rasio solvabilitas jangka pendek secara parsial tidak dapat dipergunakan untuk memprediksi terjadinya *financial distress*, hal ini dapat dilihat nilai *P value uji wald* (Sig) > 0,05. Selanjutnya untuk variabel rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan dapat memprediksi terjadinya *financial distress*, hal ini dapat dilihat dari nilai *P value uji wald* (Sig) < 0,05.

Besaran nilai prediksi ditunjukkan dengan nilai Exp (B) pada rasio kemandirian keuangan yang tinggi tidak berpotensi mengalami *financial distress* ($\log 0,463 = -0,77003$) berarti RKK dapat memprediksi negatif terhadap *financial distress*, semakin tinggi kemandirian suatu daerah maka kecil kemungkinan mengalami kondisi tekanan keuangan, karena pendapatan asli daerah cukup dapat membiayai pengeluaran daerah, hasil penelitian ini juga diperkuat penelitian (Damaiyanti, 2016) (Indriyati, 2017), semakin besar PAD suatu daerah, maka dapat memberikan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih besar, sehingga potensi mengalami tekanan keuangan semakin kecil, sehingga tingkat kemandirian daerah sangat mempengaruhi tekanan keuangan. Pada rasio fleksibilitas keuangan yang tinggi tidak berpotensi mengalami *financial distress* ($\log 1,064 = 0,062035$) berarti RFK dapat memprediksi positif terhadap *financial distress*. Pemerintah daerah yang memiliki rasio fleksibilitas yang tinggi mampu menghadapi kondisi atau peristiwa luar biasa baik dari internal maupun eksternal, sehingga tekanan keuangan dapat diminimalisir bila memiliki RFK yang tinggi, selain itu kemampuan membayar belanja pegawai dan kewajiban dapat dilakukan dengan baik (Sutaryo, 2014; Damaiyanti, 2016; Hastaningrum, 2016).

Selanjutnya pada rasio solvabilitas operasi yang tinggi tidak berpotensi mengalami *financial distress* ($\log 17,641 = 2,870226$) berarti RSO dapat memprediksi positif terhadap *financial distress*. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan daerah (laporan operasional) setelah dikurangi pendapatan DAK (laporan operasional) yang tinggi, akan dapat membiayai belanja daerah dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, penelitian ini sejalan dengan (Rusdi & Fuad, 2018), bahwa pemerintah daerah yang terhindar dari *financial distress* dapat memberikan layanan umat. Untuk rasio solvabilitas jangka pendek yang tinggi tidak berpotensi mengalami *financial distress* ($\log 0,847 = -0,16605$) berarti RSJpd dapat memprediksi negative terhadap *financial distress*. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi tingkat likuiditas pemerintah, maka semakin

kecil pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan, sebaliknya pemerintah daerah yang memiliki rasio yang rendah, akan rentan terhadap *financial distress*, tetapi pemerintah daerah yang mengelola kas atau setara kas tidak benar, hal ini akan rasio justru akan mengakibatkan terjadinya tekanan keuangan.

Sementara pada rasio solvabilitas jangka panjang yang tinggi tidak berpotensi mengalami *financial distress* ($\log 0.86 = -0,21567$) berarti RSJP dapat memprediksi negatif terhadap *financial distress*. Semakin tinggi RSJP maka semakin tinggi kemampuan membiayai belanja daerah, sehingga semakin kecil terjadinya tekanan keuangan pada pemerintah daerah, rasio ini juga menunjukkan *sustainability* (keberlanjutan) suatu pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan total aset, tetapi pemerintah daerah yang tida dapat mengoptimalkan aset, maka justru rentan dengan tekanan keuangan, dan untuk rasio solvabilitas layanan yang tinggi tidak berpotensi mengalami *financial distress* ($\log 1357,316 = 7,213264$) berarti RSL dapat memprediksi positif terhadap *financial distress*, dengan solvabilitas layanan yang tinggi maka semakin kecil berpotensi terhadap tekanan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian total aset tetap diharapkan dapat mencukupi dalam pemberian layanan publik kepada penduduk daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan argumen tersebut, maka laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai relevansi yang tinggi untuk pengambilan keputusan bagi pemakainya, sehingga kondisi tekanan keuangan dapat dihindari sedini mungkin dan dilakukan manajemen keuangan daerah secara berkelanjutan, agar pemerintah daerah terhindar dari *financial distress*. Berdasarkan nilai-nilai B pada perhitungan sebelumnya, maka model persamaan yang dibentuk sebelum dimoderasi adalah sebagai berikut:

$$Y = -59,124 - 0,770 x_1 + 0,062 x_2 + 2,870 x_3 - 0,166x_4 - 0,216x_5 + 7,213 x_6 + e$$

Tabel 6 . Persamaan Variabel setelah Moderasi

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	RKK	-,005	,001	13,602	1	,000	,995
	RFK	,001	,004	,046	1	,830	1,001
	SO	,019	,014	2,001	1	,157	1,019
	SJPD	-,001	,001	,762	1	,383	,999
	SJPJ	-,002	,001	6,572	1	,010	,998
	SL	,048	,015	9,994	1	,002	1,049
	Constant	-56,592	17,727	10,191	1	,001	,000

Berdasarkan nilai-nilai B pada perhitungan di atas, maka model persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = -56,592 - 0,005 x_1 + 0,001 x_2 + 0,019 x_3 - 0,001x_4 - 0,002x_5 + 0,48 x_6 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, terlihat bahwa nilai B mengalami penurunan, sehingga *capital intensity ratio* dapat memoderasi terjadinya *financial distress*, hal ini berarti *capital intensity ratio* dapat memprediksi rasio fleksibilitas keuangan, rasio solvabilitas operasi dan rasio solvabilitas layanan terhadap terjadinya *financial distress* semakin lemah, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan asset tetap yang efektif akan menyebabkan pendapatan yang semakin besar, sehingga dampaknya akan terhindar dari tekanan keuangan, selanjutnya *capital intensity ratio* dapat memprediksi rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas jangka panjang dan rasio jangka pendek terhadap terjadinya *financial distress* semakin kuat, hal ini terjadi ketika pemanfaatan asset tetap pemerintah daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal justru akan menimbulkan beban tambahan, sehingga akan menambah tekanan keuangan pemerintah daerah..

5. KESIMPULAN

Hasil prediksi nilai relevansi informasi akuntansi terhadap *financial distress* dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas jangka panjang dan rasio solvabilitas jangka pendek dapat memprediksi positif terhadap *financial distress*, sementara rasio fleksibilitas keuangan, rasio solvabilitas operasi dan rasio solvabilitas layanan memprediksi positif terhadap terjadinya *financial distress*, selanjutnya *capital intensity ratio* dapat memperlemah prediksi rasio fleksibilitas keuangan, rasio solvabilitas operasi dan rasio solvabilitas layanan terhadap terjadinya *financial distress*, selanjutnya *capital intensity ratio* dapat memperkuat prediksi rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas jangka panjang dan rasio jangka pendek terhadap terjadinya *financial distress*.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Implikasi bagi pemerintah daerah dapat dijadikan instrument dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi kesulitan keuangan atau sebagai peringatan dini (*early warning system*). Keterbatasan penelitian ini, sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban jangka panjang (pinjaman) dan investasi jangka pendek sehingga

ketersediaan data untuk pemilihan indikator *financial distress* tidak terpenuhi dan menggunakan indikator yang tersedia datanya. Dalam penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel kontrol dan pemanfaatan dimensi dan indikator lain untuk mengukur *financial distress*, sehingga hasilnya akan lebih objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Riset tentang prediksi relevansi nilai informasi akuntansi terhadap *financial distress* dan dimoderasi oleh *capital intensity* pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung ini dapat diselesaikan dengan baik, atas bantuan beberapa pihak : pertama, Prof. Dr. Ety Murwaningsari, Ak. M.M. CA sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi keuangan dan pasar modal yang telah banyak berdiskusi tentang hal ini, kedua: terimakasih kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam diskusi masalah data dan interpretasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assari, S. (2019). Race, depression, and financial distress in a nationally representative sample of American adults. *Brain Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/brainsci9020029>.
- Avellaneda, C. N., & Gomes, R. C. (2017). Mayoral quality and municipal performance in Brazilian local governments. *Organizações & Sociedade*, 24(83), 555–579. <https://doi.org/10.1590/1984-9240831>
- Chamboko, R., Kadira, G., Mundia, L., & Chamboko, R. K. T. (2017). Mapping patterns of financial distress among consumers in Zimbabwe. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1654–1668. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0025>
- Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-Rossi, F. (2017). Auditors and early signals of financial distress in local governments. *Managerial Auditing Journal*, 32(3), 234–250. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2016-1371>
- Cohen, S., & Zopounidis, C. (2011). *Technical University of Crete Assessing Financial Distress where Bankruptcy is not an Option: An Alternative Approach for Local Municipalities List of Working Papers*. July.
- Gregori, W. D., & Marattin, L. (2019). Determinants of fiscal distress in Italian municipalities. *Empirical Economics*, 56(4), 1269–1281. <https://doi.org/10.1007/s00181-017-1386-3>
- Hastaningrum, S., Ritonga, I. T., Akuntansi, M., & Mada, U. G. (2015). *SE-JAWA TAHUN 2011--2015*.
- Hermawan, R., & Herusantoso, K. (2015). *Penggunaan Teknik Data Mining untuk Memprediksi Financial Distress pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. 2014, 3–4. <http://juliwi.com/published/E0205/PITIW12-25.pdf>

- Indriaty, N., Setiawan, D., & Pravasanti, Y. A. (2019). the Effects of Financial Ratio, Local Size and Local Status on Financial Distress. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(01), 38. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i01.381>
- Irwan Taufiq Ritonga. (2014). Developing a measure of local government's financial condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164.
- Lai, H. Y., Aziz, A. R. A., & Chan, T. K. (2014). Effect of the global financial crisis on the financial performance of public listed construction companies in malaysia. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 19(3), 246–263. <https://doi.org/10.1108/JFMPC-02-2014-0002>
- Maher, C. S., Oh, J. W., & Liao, W. J. (2020). Assessing fiscal distress in small county governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(4), 691–711. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0016>
- Manes-Rossi, F., Nicolò, G., & Argento, D. (2020). Non-financial reporting formats in public sector organizations: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2020-0037>
- Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010*. 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- PERMENDAGRI 19 TAHUN 2020.pdf*. (n.d.).
- Prawira, I. farida adi, & Krismayanti, M. (2019). Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kejahatan Dan Pendapatan Perkapita Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.35837/subs.v3i2.608>
- Ricci, P., & Civitillo, R. (2015). Local Government Financial Distress: International Comparison and Latest Developments in the Light of the Italian Spending Review Approach. *Revista de Management Comparat Internațional*, 16(2), 239–255.
- Riphath, S., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2016). Causality Analysis Between Financial Performance And Human Development Index : A Case Study Of Provinces In Eastern Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 231–240.
- Rusdi, D., & Fuad, K. (2018). *Metode Prediksi Financial Distress Di Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat*. 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2008>
- Steccolini, I., Korac, S., Saliterer, I., Barbera, C., & Jones, M. (2018). Local government financial resilience: Germany, Italy and UK compared. *CIMA Global Academic Research Programme*, 14(2).
- sutaryo, S. (2018). Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Di Indonesia (Value Relevance of Financial Information's Cash Modified Basis: Ability of Financial Ratios). *SSRN Electronic Journal*, 0–13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2339632>
- Trussel, J. M., & Patrick, P. A. (2018). Assessing and ranking the financial risk of municipal governments : The case of Pennsylvania. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(1), 81–101. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2016-0051>
- Watson, D. J., Handley, D. M., & Hassett, W. L. (2005). Financial distress and municipal bankruptcy: the case of prichard, alabama. *Journal of Public Budgeting, Accounting*

- & *Financial Management*, 17(2), 129–150. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-17-02-2005-b001>
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 100. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.639>
- Yanti, R. D. (2018). Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3783>.